



Article Informations
Corresponding Email:
jihanrahida14@gmail.com

Received: 26/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

DAMPAK KOREA ELECTRONIC TRAVEL AUTHORIZATION (K-ETA) TERHADAP PENURUNAN WISATAWAN THAILAND KE KOREA SELATAN TAHUN 2022-2024

Jihan Rahmadini Hidayat

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Fenomena penerapan Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA) sejak 2021 mencerminkan strategi Korea Selatan dalam mengelola arus masuk wisatawan asing sekaligus memperkuat keamanan nasional pasca-pandemi COVID-19. Kebijakan ini tidak hanya menyederhanakan prosedur perjalanan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata yang berdampak serius oleh pandemi. Popularitas Korean Wave (Hallyu) semakin memperkuat daya tarik Korea Selatan sebagai destinasi global, meski di sisi lain pemerintah menghadapi tantangan struktural berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi, populasi menua, serta ketidakpastian politik domestik. Penerapan dan pengecualian K-ETA, khususnya dalam kampanye Visit Korea Year 2023–2024, menunjukkan upaya adaptif pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan keterbukaan ekonomi. Kenaikan ini lah yang membuat peneliti mulai pada tahun 2022. Namun kebijakan ini juga memunculkan risiko, mulai dari potensi penyalahgunaan sistem, kesiapan infrastruktur pariwisata, hingga friksi diplomatik dengan negara mitra. Dengan demikian, kajian mengenai K-ETA menjadi relevan untuk memahami bagaimana kebijakan imigrasi digital dapat berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi sekaligus strategi pembangunan berkelanjutan di era global.

Kata Kunci: K-ETA, Kebijakan Imigrasi, Visit Korea Year

Abstract

The implementation of the Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA) since 2021 reflects South Korea's strategy to regulate the inflow of foreign visitors while strengthening national security in the post-COVID-19 era. Beyond simplifying travel procedures, the policy is designed to support economic recovery through the tourism sector, which was severely affected by the pandemic. The global popularity of the Korean Wave (Hallyu) has further enhanced South Korea's appeal as a destination, although structural challenges such as slowing economic growth, an aging population, and domestic political uncertainty persist. The introduction and partial exemptions of

K-ETA, particularly during the Visit Korea Year 2023–2024 campaign, highlight the government's adaptive efforts to balance security concerns with economic openness. This increase is what made researchers start in 2022. Nevertheless, the policy also generates risks, ranging from system misuse and tourism infrastructure readiness to diplomatic friction with partner states. Accordingly, K-ETA provides a critical lens to understand how digital immigration policies can function as instruments of economic diplomacy and sustainable development strategies in a globalized era.

Keywords: K-ETA; immigration policies, Visit Korea Year

1. PENDAHULUAN

Kebijakan Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA) yang mulai diberlakukan tahun 2021 merupakan instrumen penting Korea Selatan untuk mengatur arus masuk wisatawan asing, memperkuat keamanan nasional, sekaligus mendorong pemulihan sektor pariwisata pascapandemi COVID-19. Penerapan K-ETA dilatarbelakangi oleh krisis pariwisata akibat pandemi, perlambatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, serta kebutuhan menjaga daya saing global di tengah meningkatnya popularitas Korean Wave (Hallyu).

Urgensi kebijakan ini terlihat dari peran strategis pariwisata terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah Korea Selatan menilai penyederhanaan prosedur perjalanan dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan, menekan hambatan administratif, dan memperkuat citra negara. Melalui kampanye Visit Korea Year 2023–2024, kebijakan pengecualian K-ETA juga diterapkan bagi sejumlah negara guna mendorong perjalanan spontan dan memperluas dampak ekonomi, termasuk pada sektor perhotelan, transportasi, kuliner, industri kreatif, dan UMKM.

Namun, penerapan dan pengecualian K-ETA tidak lepas dari tantangan. Di satu sisi, kebijakan ini mendukung pertumbuhan devisa, interaksi budaya, serta perluasan soft power Korea Selatan. Di sisi lain, muncul risiko keamanan, keterbatasan infrastruktur, serta dinamika hubungan bilateral. Kasus dengan Thailand menjadi contoh penting: sistem K-ETA banyak menolak wisatawan Thailand, memicu penurunan signifikan kunjungan dan sentimen anti-Korea. Masalah ini semakin kompleks karena Thailand juga tercatat sebagai penyumbang terbesar imigran ilegal di Korea Selatan. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dampak kebijakan K-ETA terhadap perekonomian dan pariwisata Korea Selatan pada periode 2021–2024.
2. Mengkaji implikasi K-ETA terhadap dinamika hubungan Korea Selatan–Thailand.
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan hubungan bilateral dan efektivitas K-ETA sebagai instrumen diplomasi ekonomi.

Dengan meninjau literatur mengenai kebijakan visa elektronik, diplomasi ekonomi, serta hubungan internasional Korea Selatan, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa K-ETA tidak hanya menjadi kebijakan teknis di bidang imigrasi, tetapi juga instrumen strategis yang memengaruhi citra negara, arus wisatawan, dan kualitas hubungan bilateral.

2. PEMBAHASAN

Hubungan Korea Selatan–Thailand memiliki fondasi historis kuat sejak Perang Korea, ketika Thailand mengirim pasukan sebagai bentuk solidaritas politik pro-Barat. Sejak pembukaan hubungan diplomatik resmi 1958, relasi berkembang dari kerja sama politik menjadi kemitraan strategis (2012) dengan spektrum luas: perdagangan, investasi, budaya, hingga keamanan kawasan. Fenomena Korean Wave memperkuat kedekatan masyarakat Thailand dengan Korea Selatan, meskipun juga memunculkan kekhawatiran soal dominasi budaya.

Dalam periode 2021–2024, hubungan bilateral memasuki fase baru yang dipengaruhi pemulihan pasca-pandemi COVID-19, integrasi ekonomi regional lewat RCEP, dan implementasi K-ETA. Di bidang perdagangan, nilai mencapai sekitar US\$ 15 miliar per tahun dengan tren investasi Korea Selatan ke industri berteknologi tinggi di Thailand. Namun, sektor pariwisata—salah satu pilar hubungan people-to-people—justru terganggu oleh K-ETA. Wisatawan Thailand menurun drastis, bahkan sampai 19,5% pada pertengahan 2024, sehingga menimbulkan protes diplomatik.

Analisis menunjukkan dilema klasik: dari sudut pandang Seoul, K-ETA diperlukan untuk menekan imigran ilegal asal Thailand yang jumlahnya melonjak hingga 157 ribu orang pada 2023. Namun, dari perspektif Bangkok,

kebijakan ini menciptakan diskriminasi terhadap wisatawan sah dan merusak citra Korea Selatan sebagai destinasi ramah wisatawan. Data KTO (2020) dan Yonhap News (2024) menunjukkan bahwa meski total kedatangan wisatawan internasional Korea melonjak pada 2023–2024, tren wisatawan asal Thailand justru stagnan atau menurun.

Kebijakan K-ETA juga harus dilihat dalam konteks makro ekonomi Korea Selatan pasca-pandemi. Setelah rebound 2021 (+4,6%), pertumbuhan melambat pada 2022–2023 hingga hanya 1,4%. Faktor eksternal seperti perang Rusia–Ukraina dan inflasi energi memperburuk tekanan domestik seperti populasi menua (fertilitas 0,72), utang rumah tangga tinggi, dan ketergantungan pada ekspor semikonduktor. Di sinilah sektor pariwisata diproyeksikan sebagai mesin alternatif pertumbuhan. Pemerintah memanfaatkan K-ETA bukan hanya sebagai kebijakan imigrasi, tetapi juga instrumen ekonomi-diplomasi: efisiensi perjalanan, basis data wisatawan, dan branding pariwisata lewat program Visit Korea Year 2023–2024.

Namun, implementasi K-ETA menghasilkan paradoks. Di satu sisi, kebijakan ini mempercepat imigrasi bandara dan menambah legitimasi keamanan domestik. Di sisi lain, terjadi penolakan aplikasi tinggi dari wisatawan Thailand, yang menciptakan kerugian devisa dan sentimen anti-Korea. Literatur mengenai diplomasi ekonomi menekankan bahwa instrumen pariwisata dapat memperkuat hubungan bilateral bila dikelola inklusif, bukan eksklusif. Karena itu, kegagalan Seoul menyeimbangkan kontrol imigrasi dengan kepentingan pariwisata justru memperlemah “mutual trust” dengan Thailand.

Interpretasi logis dari dinamika ini adalah: keberhasilan K-ETA sangat ditentukan oleh fleksibilitas adaptif. Jika Korea Selatan tetap kaku, pasar wisata utama seperti Thailand akan terus melemah, meskipun kompensasi dari negara lain mungkin menutupi sebagian kerugian. Namun, jika kebijakan dilonggarkan dengan mekanisme fast-track approval untuk wisatawan terverifikasi, maka arus pariwisata Thailand berpotensi pulih dan memberi kontribusi positif pada pemulihan ekonomi bilateral.

2.1 K-ETA bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan titik uji hubungan Korea Selatan–Thailand.

Hubungan Korea Selatan dan Thailand menunjukkan pola yang khas: dimulai dari basis historis berupa dukungan militer Thailand pada Perang Korea (1950–1953) hingga berkembang menjadi kemitraan strategis di era

kontemporer. Fondasi sejarah ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi membentuk legitimasi moral yang terus digunakan Korea Selatan dalam memperkuat jejaring diplomasi di Asia Tenggara (Acharya, 2014). Fakta bahwa Thailand adalah negara ASEAN pertama yang menjalin strategic partnership dengan Korea Selatan (2012) memperlihatkan kesinambungan antara warisan sejarah dan realitas geopolitik modern.

Secara ekonomi, hubungan kedua negara mengalami transformasi signifikan. Dari kerja sama terbatas di era 1960–1970-an, kini nilai perdagangan mencapai ±US\$15 miliar per tahun, didorong integrasi rantai pasok elektronik, otomotif, dan energi (ASEAN Secretariat, 2023). RCEP sejak 2022 juga memperkuat pola interdependensi, terutama di sektor teknologi tinggi seperti EV (Hyundai, Kia). Data ini menunjukkan bahwa relasi Korea–Thailand bukan sekadar “mitra tradisional”, tetapi telah berevolusi menjadi hubungan economic complementarity yang strategis.

Namun, hubungan tersebut tidak sepenuhnya bebas friksi. Implementasi Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA) sejak 2021 menimbulkan ketegangan, khususnya karena Thailand termasuk pasar wisatawan terbesar ke Korea. Jumlah pengunjung Thailand yang sebelumnya 571 ribu (2019) turun drastis menjadi 380 ribu (2023), bahkan minus 19,5% pada pertengahan 2024 (Yonhap, 2024). Pemerintah Korea berdalih bahwa Thailand adalah sumber terbesar imigran ilegal (157 ribu orang pada 2023), sehingga K-ETA menjadi alat pengendalian migrasi (Korean Ministry of Justice, 2023). Dilema ini memperlihatkan logika “securitization of migration” (Buzan, Wæver & de Wilde, 1998), di mana isu mobilitas manusia diperlakukan sebagai ancaman keamanan, bukan sekadar fenomena sosial-ekonomi.

Kebijakan K-ETA pada akhirnya menimbulkan paradoks. Dari sisi Korea Selatan, ia berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi—mempermudah imigrasi, mendukung target 20 juta wisatawan asing (Visit Korea Year 2023–

2024), dan menyediakan basis data wisatawan untuk perencanaan kebijakan. Namun dari perspektif Thailand, K-ETA dianggap diskriminatif karena tidak berlaku bagi negara ASEAN lain seperti Singapura atau Malaysia yang justru mendapat pengecualian. Ketegangan ini menggerus citra Korea sebagai destinasi ramah wisatawan dan berpotensi menurunkan people-to-people exchange, padahal faktor budaya (Hallyu) dan pariwisata adalah aset utama dalam hubungan bilateral.

Dalam konteks perekonomian Korea Selatan pasca pandemi, kebijakan K-ETA juga tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan domestik. Pertumbuhan yang sempat rebound +4,6% (2021) melemah hingga 1,4% (2023), tertekan inflasi, utang rumah tangga, serta penurunan ekspor semikonduktor (Financial Times, 2025). Pemerintah menempatkan pariwisata sebagai salah satu motor pemulihan (kontribusi US\$21 miliar pada 2019), sehingga kontrol migrasi melalui K-ETA dilihat sebagai upaya “mengamankan” potensi pariwisata dari beban imigran ilegal. Namun secara diplomatik, kebijakan ini justru mengorbankan hubungan dengan Thailand, mitra strategis utama di Asia Tenggara.

Dengan demikian, dinamika Korea Selatan–Thailand 2021–2024 dapat dipahami sebagai negosiasi antara tiga variabel besar:

1. Warisan historis dan legitimasi politik – solidaritas sejak Perang Korea masih menjadi landasan simbolik kerja sama.
2. Interdependensi ekonomi – perdagangan, investasi, dan teknologi memperkuat kemitraan strategis meskipun ada hambatan pariwisata.
3. Dilema kebijakan imigrasi (K-ETA) – keamanan domestik berbenturan dengan kepentingan diplomasi budaya dan pariwisata.

Prospeknya, jika Korea Selatan tetap mempertahankan sikap kaku atas K-ETA, maka hubungan people-to-people dengan Thailand akan terus menurun, meski relasi ekonomi tetap solid lewat RCEP dan investasi EV. Sebaliknya, penyesuaian kebijakan—misalnya fast-track approval bagi wisatawan terverifikasi—dapat memulihkan arus pariwisata tanpa mengorbankan kontrol imigrasi. Dengan kata lain, masa depan hubungan bilateral ini sangat ditentukan oleh kemampuan Korea Selatan

menyeimbangkan logika keamanan (security logic) dengan logika diplomasi ekonomi (economic diplomacy).

3. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA) periode 2022–2024 menghadirkan paradoks dalam hubungan bilateral Korea Selatan–Thailand. Kebijakan yang awalnya dirancang sebagai instrumen keamanan imigrasi sekaligus diplomasi ekonomi ternyata memunculkan friksi diplomatik, terutama karena tingginya tingkat penolakan terhadap wisatawan Thailand.

Dampaknya cukup signifikan: jumlah wisatawan Thailand mengalami penurunan konsisten, dengan catatan -19,5% pada Juli 2024, yang berimbas pada devisa pariwisata sekaligus memunculkan persepsi diskriminatif di masyarakat Thailand. Dari perspektif diplomasi ekonomi, K-ETA memperkuat kontrol imigrasi dan menekan angka imigran ilegal, tetapi justru melemahkan soft power Korea Selatan yang berbasis pada people-to-people exchange.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik Thailand terhadap Korea Selatan serta mendorong pergeseran destinasi wisata ke negara lain dengan regulasi yang lebih ramah. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak agar kepentingan keamanan dapat diseimbangkan dengan keterbukaan ekonomi dan diplomasi.

3.1 Rekomendasi Kebijakan

Pertama, Korea Selatan perlu melakukan evaluasi selektif terhadap implementasi K-ETA, khususnya bagi negara mitra strategis seperti Thailand. Relaksasi parsial dan prosedur yang lebih transparan dapat menekan hambatan administratif tanpa mengorbankan keamanan.

Kedua, komunikasi publik dan diplomasi harus lebih inklusif. Mekanisme jalur banding bagi pemohon yang ditolak serta promosi pariwisata yang agresif dapat memperbaiki citra Korea Selatan di mata wisatawan Thailand.

Ketiga, forum bilateral maupun multilateral, seperti Korea–Thailand Mutual Visit Years 2023–2024, ASEAN+3, dan KASI, perlu dimaksimalkan sebagai

ruang koordinasi untuk menyeimbangkan kepentingan imigrasi dan diplomasi ekonomi.

3.2 Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian mendatang dapat memperluas analisis dengan membandingkan dampak K-ETA terhadap negara ASEAN lain seperti Vietnam, Filipina, atau Indonesia. Studi komparatif dengan sistem izin perjalanan digital lain, seperti ESTA (Amerika Serikat) atau eTA (Kanada), juga penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang relevan bagi Korea Selatan.

REFERENSI

- Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*. . Oxon: Routledge.
- Adhesya Dewi Komara. 2018. *Penyelesaian Krisis Ekonomi 1997–2001 di Korea Selatan dan Indonesia: Sebuah Perbandingan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Allianz trade. 2025. “Economic structure to remain sound despite rising global headwinds.” South Korea: Economic structure to remain sound despite rising global headwinds.
- AP News. 2024. South Korea’s central bank cuts key interest rate to nurse a slower economy. AP News: South Korea's central bank cuts key interest rate to nurse a slower economy | AP News
- Ayu Ratnaningsih. 2025. “Ekonomi Korea Selatan Tumbuh 2% pada 2024 di Tengah Krisis Politik dan Lemahnya Permintaan Domestik”. Diakses dari: <https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/ekonomi-korea-selatan-tumbuh-2-pada-2024-di-tengah-krisis-politik-dan-lemahnya-permintaan-domestik>
- Bangkok Post. 2024. “Thai tourists to continue shunning South Korea.” <https://www.bangkokpost.com/business/general/2814056/thai-tourists-to-continue-shunning-south-korea?>

- Bangkok Post. 2024. "Thai-Korean ties: Building on solid foundations." <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2745116/thai-korean-ties-building-on-solid-foundations>.
- Bayne, N. &. (2017). *The new economic diplomacy: Decision-making and negotiation in international economic relations*. New Jersey: Routledge.
- Berridge, G.R. & James, Alan. 2003. *A Dictionary of Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Burchill, Scott & Linklater, Andrew. 2009. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Carbó-Catalan, Elisabet & Roig Sanz, Diana. (Tahun tidak disebut). [Tanpa judul lengkap, perlu dilengkapi informasi sumber].
- Chung Min Lee. 2024. *The Future of K-Power: What South Korea Must Do After Peaking*. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.
- Cha, V. D. 2016. *Powerplay: The origins of the American alliance system in Asia*. . New Jersey: Princeton University Press.
- Djelantik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- East Asia Forum. 2024. "Geopolitics and global slowdown weigh on South Korea's economy." *Geopolitics and global slowdown weigh on South Korea's economy | East Asia Forum*
- Etaportal. 2024. Why K-ETA (Korea Electronic Travel Permit System) is necessary. etaportal.net/board/1759
- Foundation, K. (2019). *Korea-Thailand relations report*. Seoul: KF Publications.
- Gunjoo Jang, &. W. (2012). Korean Wave as tool for Korea's new cultural diplomacy. . *Advances in Applied Sociology*, 196–202.
- Griffiths, Martin. 2001. *50 Pemikir Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hadari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hayasha Zuriati Robbani. 2023. Dampak Popularitas Korean Wave terhadap Industri Kreatif di Indonesia Periode 2020–2022. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Jackson, Robert & Sorensen, Georg. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Korea Tourism Organization. . (2023). Visit Korea Year 2023–2024 official guide. Seoul: KTO.
- Korean Ministry of Justice. (2023). Immigration statistics 2023. Seoul: Government of Korea.
- Lee Da Som. 2024. “Korea Perpanjang Pembebasan Sementara K-ETA Hingga Akhir 2025”. Diakses dari:
<https://indonesian.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=263307>
- Nation Thailand. 2023. South Korea, Thailand launch mutual tourism campaign for 2023-2024.
- Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. . PublicAffairs.
- Ratnaningsih, Ayu. 2025. Ekonomi Korea Selatan Tumbuh 2% pada 2024 di Tengah Krisis Politik dan Lemahnya Permintaan Domestik. Diakses dari:
<https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/ekonomi-korea-selatan-tumbuh-2-pa-da-2024>
- Robbani, Hayasha Zuriati. 2023. Dampak Popularitas Korean Wave terhadap Industri Kreatif di Indonesia Periode 2020–2022. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- S&P Global. 2023. South Korea's economy faces rising headwinds in 2023.
- Sudijono, Anas. 1996. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Maura. 2020. Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Meningkatkan Ekspor Sarang Burung Walet ke Tiongkok Periode 2012–2018. Jakarta: UPN Veteran.

Thaiger. 2024. South Korea reaffirms commitment to Thailand amidst immigration controversy. Promoting bilateral relations: South Korea and Thailand | Thaiger

Thailand Ministry of Commerce. (2001). Trade statistics Thailand–Korea 1990–2000. Bangkok: MoC.

The Embassy of the Republic of Korea to the Republic of South Africa. 2024. Mandatory K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) Required for Visa-free country travelers.

The Korean Times. 2024. Korea's tourism industry urges gov't to revise K-ETA rules on Thai visitors.

The Korean Economic Daily. 2025. S.Korea's economy grows 2.0% in 2024; Q4 GDP below forecast.

The Nation Thailand. (2024). Complaints mount over Korea's K-ETA rules. . Bangkok: The Nation. Retrieved from <https://www.nationthailand.com>

Titing Reza Fahriza. 2022. Exports Driven by Hallyu Increasing South Korea's Economic Growth – Cultural Diplomacy Approach. Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XV No. 1.

Travel and Tour.id. 2024. “Korea Selatan Perpanjang Pengecualian K-ETA Baru untuk Singapura dan Dua Puluh Satu Negara, Tingkatkan Pariwisata di Seluruh Asia dan Luar Negeri Hingga Desember 2025”. Diakses dari: <https://www.travelandtourworld.id/news/article/south-korea-extends-new-k-eta-exemption-for-singapore-and-twenty-one-nations-surgin-tourism-across-asia-and-beyond-until-december-2025>

United Nations Command . (2019). The Korean War and Thailand's contribution. Retrieved from UNC Archives.

UNWTO. (2020). International tourism highlights 2019. Madrid: United Nations World Tourism Organization.

Yonhap News. (2024). Thai visitors to Korea drop sharply amid K-ETA complaints. Yonhap. Retrieved from <https://en.yna.co.kr>